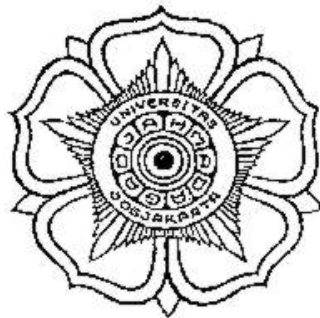


**NASKAH PUBLIKASI**  
**INDEKS DEMOKRASI EKONOMI**  
**INDONESIA**



Oleh:

Awan Santosa, S.E, M.Sc  
(Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM/  
Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

# INDEKS DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Awan Santosa, S.E, M.Sc

## Latar Belakang

Konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus oleh pakar ekonomi di dalam maupun di luar negeri dengan berbagai varian pengertian dan ciri-cirinya (Douglas (1920), Carnoy (1980), Dahl (1985), Poole (1987), dan Smith (2000)). Konsep ini bahkan sudah dipikirkan ekonom Indonesia, khususnya M. Hatta, sejak tahun 1930 yang kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Konsep ini terus dikembangkan oleh ekonom-ekonom Indonesia dengan berbagai ragam terminologi (Mubyarto (1980), Swasono (1987), Arief (2000), dan Baswir (2002)).

Demokrasi ekonomi di Indonesia dipandang para pendiri bangsa sebagai cara untuk memerdekakan ekonomi bangsa. Demokrasi ekonomi merupakan bagian dari agenda reformasi sosial, yaitu mengganti sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nasional, guna menghapus pola hubungan ekonomi yang timpang, eksploitatif dan sub-ordinatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia dan mengubah struktur sosial-ekonomi warisan kolonial yang jauh dari nilai-nilai keadilan sosial tersebut.

Sistem ekonomi kolonial mewariskan struktur ekonomi yang sangat timpang di mana kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian nasional. Hal yang berkebalikan menimpa kelompok ekonomi bawah yang jumlahnya mayoritas namun menguasai dan menikmati hasil produksi dalam taraf yang sangat minimal. Gambaran riil perihal struktur ekonomi dapat diilustrasikan melalui hasil observasi Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam tiga golongan besar:

- 1) Golongan Atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (khususnya Belanda) yang menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negeri jajahan mereka.
- 2) Golongan menengah, yang 90% terdiri dari kaum perantara perdagangan, khususnya dari etnis Tionghoa (China), yang mendistribusikan hasil-hasil produksi masyarakat jajahan ke perusahaan besar dan ekonomi luaran. Dalam kelompok ini terdapat 10% bangsa Indonesia yang mampu menguasai dan menikmati hasil perekonomian karena mempunyai kekuasaan (jabatan) tertentu (elit), itu pun berada di posisi paling bawah pada lapisan ini.
- 3) Golongan bawah, yang terdiri dari massa rakyat pribumi yang bergerak pada perekonomian rakyat, yang tidak mampu menguasai dan menikmati hasil-hasil produksi mereka karena berada dalam sistem ekonomi kolonialis.

Hatta memandang bahwa perbaikan kondisi ekonomi rakyat tidak mungkin hanya disandarkan pada proklamasi kemerdekaan. Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno, yang dimaksud dengan struktur

ekonomi nasional adalah sebuah struktur perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat Indonesia dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air.

“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia” (Hatta, 1960).

Reformasi sosial hanya dimungkinkan melalui demokratisasi ekonomi, di mana kolektivitas (kekeluargaan dan kebersamaan) menjadi dasar pola produksi dan distribusi (mode ekonomi). Sebagaimana ditulis Hatta, “Di atas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong—*pen.*) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya” (Hatta, 1932).

Demokrasi ekonomi dirumuskan para pendiri bangsa, terutama Hatta, sebagai cita-cita konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam demokrasi ekonomi, semua aktivitas ekonomi idealnya disatukan dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan. Hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, sedangkan pengelolaannya dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat sendiri. Konsep demokrasi ekonomi kemudian dituangkan dalam UUD 1945 sebagai dasar sistem perekonomian nasional.

Pasca krisis moneter 1997/1998 konsep demokrasi ekonomi dijadikan sebagai alternatif solusi melalui pembuatan TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada saat ini pun, seiring pelaksanaan otonomi daerah (Otda) banyak daerah secara eksplisit menyatakan demokrasi ekonomi sebagai bagian dalam visi, misi, dan strategi pembangunannya. Kenyataan ini menunjukkan makin pentingnya orientasi pembangunan pada kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi (Mubyarto, 1997).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang bersifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Kondisi ini tidak terlepas dari bias konseptual di mana pemahaman publik terhadap demokrasi terdistorsi hanya sebatas demokrasi pada dimensi politik (demokrasi politik). Kondisi yang merupakan fenomena global ini mendorong ketimpangan perkembangan konsepsi demokrasi di dunia, terutama di negara-negara bekas jajahan seperti halnya Indonesia. Saat ini terdapat setidaknya delapan Indeks Demokrasi Politik yang mengukur kebebasan politik, pemilu,

partisipasi rakyat, dan fungsi lembaga negara (Ericsson & Lane, 2002). Baru tataran demokrasi politik inilah yang dikorelasikan dengan indikator sosial-ekonomi seperti pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Korelasi tersebut dapat ditemukan pada berbagai model yang dikembangkan berdasar studi empiris di negara-negara tertentu. Model "*Virtuous Triangle*" melihat bahwa pembangunan manusia akan menjadi jalan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang selanjutnya akan berkorelasi positif satu sama lain (UNSFIR dalam Kuncoro, 2004). Selain itu terdapat model "*Cruel Choice plus Trickle Down*" yang meletakkan pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat munculnya demokrasi dan pembangunan manusia.

Adapun model pertumbuhan endogen dan demokrasi versi Balla melihat posisi pembangunan manusia sebagai variabel paling penting dalam menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi prasyarat bagi berkembangnya demokrasi. Model yang agak berbeda dikembangkan oleh Balla, di mana demokrasi justru menjadi pilar kunci bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan perbaikan kualitas pembangunan manusia di suatu negara.

Sementara itu, indikator spesifik yang sudah ada justru tersedia untuk mengukur liberalisasi ekonomi dunia, yaitu *Index of Economic Freedom* (The Heritage Foundation, 1980). Indeks ini mengukur derajat kebebasan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran individual melalui kebebasan dalam bisnis, fiskal, moneter, perdagangan, investasi, keuangan, pemerintahan, korupsi, HAKI, dan kebebasan buruh. Indeks ini sudah menjadi variabel bebas yang dikorelasikan dengan GDP perkapita, pengangguran, dan inflasi.

Ketiadaan model dan ukuran operasional demokrasi ekonomi menjadi masalah di tengah munculnya fenomena ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi di Indonesia saat ini. Rasio gini Indonesia meningkat dari 0,29 pada tahun 2002 menjadi 0,35 pada tahun 2006. Kue nasional yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk termiskin justru turun dari 20,92 tahun 2002 menjadi 19,2 pada tahun 2006. Ironisnya, yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya naik dari 44,7% menjadi 45,7% pada tahun yang sama (Kuncoro, 2007).

Pada saat yang sama nilai High Net Worth Individual (HNWI) Indonesia adalah sebesar 16%, padahal di Asia-Pasifik 8,6% dan rata-rata 8,3%. Sementara per Juli 2007, 1.380 Trilyun dana pihak ketiga di bank 80%-nya dikuasai 1,82% pemegang rekening (Kuncoro, 2007). Per 2006, UMKM yang sebesar 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia hanya menikmati 37,6% "kue nasional", sedangkan usaha besar yang hanya 0,1%-nya justru menikmati 46,7%-nya pada tahun yang sama. Nilai ini naik sebesar 3,6% dibanding tahun 2003 (KNKUKM, 2007).

### **Studi Landasan Legal-Formal**

Literatur dokumen legal utama yang menjadi landasan penyelenggaraan demokrasi ekonomi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelum perubahan keempat pada tahun 2002 berisi 3 ayat sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau

penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi; kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh ke orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasar kutipan penjelasan tersebut maka isi (substansi) demokrasi ekonomi dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu “produksi oleh semua”, “produksi untuk semua”, dan “produksi di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”. Perwujudan substansi demokrasi ekonomi tersebut dapat ditemukan pada bagian lain dalam UUD 1945. Konsep “produksi oleh semua” dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini mengindikasikan penekanan demokrasi ekonomi pada masalah pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial tenaga kerja (buruh).

Konsep “produksi untuk semua” dipertegas dalam pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan demokrasi ekonomi juga menekankan perhatian pada pola alokasi dan konsumsi, utamanya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Politik alokasi dilakukan oleh negara melalui instrument belanja publik yang harus mampu memberikan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan (*vulnerable*) lain seperti halnya anak-anak terlantar di Indonesia.

Konsep “produksi di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat” dapat diwujudkan melalui keberdayaan rakyat banyak yang terhimpun dalam serikat-serikat ekonomi. Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” member arahan bagi kebersatuan ekonomi rakyat tersebut. Pasal ini mengindikasikan perlunya keberdayaan wadah-wadah perjuangan ekonomi rakyat sepertihalnya koperasi dan serikat pekerja dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Peranan anggota-anggota masyarakat dalam penguasaan dan kontrol perekonomian hanya dimungkinkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat didorong melalui pendidikan. Pasal 31 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” mengindikasikan pentingnya akses pendidikan, yang juga perlu didukung akses terhadap kesehatan, yang wajib disediakan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi. Anggota-anggota masyarakat yang terdidik dan sehat akan mampu berpengaruh besar dalam perekonomian nasional.

Penguasaan dan kontrol anggota-anggota masyarakat terhadap faktor produksi diformulasikan melalui peranan negara yang vital dalam perekonomian, yang tercantum dalam ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Dalam rangka demokrasi ekonomi maka negara yang merupakan perwujudan anggota-anggota masyarakat menguasai dan memegang kontrol pengelolaan atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Literatur legal lain yang berisi muatan spesifik perihal demokrasi ekonomi adalah Ketetapan MPR No XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam TAP MPR ini disebutkan bahwa demokrasi ekonomi diselenggarakan melalui dukungan pengembangan (keberpihakan) yang jelas dan tegas pemerintah kepada pelaku ekonomi rakyat (usaha kecil, menengah, dan koperasi) tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN. Wujud dukungan (keberpihakan) tersebut adalah peningkatan akses mereka terhadap SDA, tanah (lahan), dan sumber dana (modal). Di samping itu, demokrasi ekonomi bagi pekerja diselenggarakan melalui kesempatan pekerja untuk memiliki saham perusahaan.

### **Studi Literatur Pendukung**

Hatta dalam bukunya *Beberapa Fasal Ekonomi (1950)* menguraikan penerapan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 ke dalam beberapa aspek berdasarkan analisisnya pada situasi ekonomi-politik Indonesia pada masa itu. Menurut Hatta dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi, yang hendaknya dimulai susunannya di desa karena masyarakat Indonesia pusatnya di desa. Terkait dengan kondisi agrarisnya maka menurut Hatta faktor produksi terutama adalah tanah yang hendaknya dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa.

Persoalan yang juga dinilai penting dalam memajukan demokrasi ekonomi menurut Hatta adalah bagaimana memperbaiki tenaga produktif rakyat yang akan menjadi tulang punggung produksi nasional. Pembaruan ini dilakukan melalui pemusatan perhatian pembangunan ekonomi kepada peningkatan akses rakyat terhadap makanan berkualitas melalui kebijakan upah yang dapat mempertinggi daya beli rakyat. Di samping itu, perhatian terhadap tempat kediaman dan kesehatan tenaga produktif rakyat juga menjadi indikasi penyelenggaraan demokrasi ekonomi. Hatta juga memandang arti pentingnya keberadaan Bank Industri Rumah yang menyediakan kapital bagi ekonomi rakyat dan penyediaan pendidikan yang dapat meningkatkan kecakapan tenaga produktif rakyat.

Sukarno dalam artikelnya di harian *Fikiran Ra'Jat* (1932) berjudul *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi* memaparkan demokrasi ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi politik. Sosio-demokrasi yang dipikirkan Sukarno bukan sekedar menempatkan kedaulatan rakyat secara politik yang dimanifestasikan dalam pemilihan umum, melainkan juga kedaulatan rakyat secara ekonomi, yang dimanifestasikan dengan kecilnya ketimpangan sosial-ekonomi, tidak terjadinya eksploitasi ekonomi, dan tidak adanya segelintir elit ekonomi (borjuasi) yang menguasai begitu banyak sumber daya ekonomi.

Swasono sebagai editor buku *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi (1985)* menyimpulkan bahwa penyelenggaraan demokrasi ekonomi di Indonesia dilakukan melalui pengembangan organisasi koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan penerapan bangun usaha (jiwa) koperasi oleh seluruh bentuk pengelolaan perusahaan yang ada. Dalam demokrasi ekonomi koperasi dapat pula melakukan penyertaan dalam perusahaan, sehingga dapat turut serta dalam pengambilan kebijakan di dalam perusahaan. Dalam artikel lepas yang terhimpun dalam buku tersebut pengasosiasian demokrasi ekonomi dengan bangun usaha koperasi (kooperasi) masih dominan. Hal ini terlihat dalam pemikiran Hatta, Damanik, Sudjanadi, Emil Salim, Wahju Sukotjo, Swasono, Mubyarto, dan Dawam Rahardjo yang memusatkan perhatian pada pemberdayaan koperasi dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Dalam bukunya berjudul *Kerakyatan, Demokrasi Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial* (2008), Swasono memandang bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sudah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1-3 beserta Penjelasannya. Demokrasi ekonomi menurut Swasono bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menyanggah pemihakan terhadap yang lemah, miskin, dan terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus kearah pemberdayaan.

Dalam kaitan dengan butir-butir yang dicakup oleh pengertian demokrasi ekonomi dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Swasono menekankan pentingnya keberadaan usaha bersama ekonomi yang diberi wujud dalam pemilikan bersama dan tanggung jawab bersama. Swasono mengajukan prinsip dasar kebersamaan *Triple-Co*, yaitu *Co-ownership* (ikut dalam memiliki saham), *Co-determination* (ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha), dan *Co-responsibility* (ikut bertanggungjawab dalam menyelamatkan usaha bersama). Ketiga prinsip ini sudah inheren di dalam badan usaha koperasi dan yang menurut Swasono dapat diterapkan dalam badan usaha non-koperasi melalui pola kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja, masyarakat, dan koperasi.

Mubyarto dalam bukunya *Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi* (1997) menempatkan demokrasi ekonomi sebagai cara perwujudan ekonomi kekeluargaan atau cara perwujudan ekonomi Pancasila. Demokrasi ekonomi yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan perwujudan dari Sila Kerakyatanan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Mubyarto berpandangan bahwa demokrasi ekonomi merupakan cara untuk meningkatkan pemerataan atau mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial melalui pemanfaatan seluruh tenaga kerja secara optimal (berkurangnya pengangguran).

Dalam pada itu menurut Mubyarto demokrasi ekonomi terwujud melalui desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah, di mana pengambilan putusan-putusan ekonomi dapat lebih banyak dilakukan di daerah. Pajak-pajak seyogyanya makin banyak yang dilimpahkan penarikan dan penggunaannya ke daerah-daerah. Hal ini sejalan dengan konsepsi demokrasi ekonomi yang juga diartikan Mubyarto sebagai cara-cara pengambilan putusan-putusan ekonomi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait dan putusan tersebut adalah untuk kemanfaatan seluruh pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini sejalan dengan pandangannya tentang koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang menjadi salah satu ciri penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Sritua Arief dalam bukunya berjudul *Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta* (2002) mengulas demokrasi ekonomi Indonesia dengan penekanan pada keadilan dalam aspek produksi dan alokasi hasil produksi (penerimaan). Sritua menilai demokrasi ekonomi baru terwujud melalui keadilan dalam pemberian kompensasi terhadap buruh, petani, pengusaha kecil, dan konsumen (masyarakat), yang dimungkinkan jika tidak terjadi eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh para pemburu rente.

Demokrasi ekonomi juga dimaknai Sritua sebagai penyertaan rakyat banyak dalam proses pembangunan, yang dalam konteks perdesaan maka prasyarat yang harus dipenuhi adalah penataan kepemilikan tanah dan bagi hasil yang adil. Di daerah perkotaan, demokrasi ekonomi dilakukan melalui kebijakan perizinan, kebijakan kredit, dan pemberian kesempatan. Dalam pada itu, koperasi juga tetap dipandang Sritua sebagai organisasi ekonomi rakyat yang jika berdaya maka akan mampu mendorong kearah perwujudan demokrasi ekonomi Indonesia.

Arief Budiman dalam artikelnya di buku *Sosok Demokrasi Ekonomi Indonesia* (1993) mengartikan demokrasi ekonomi sebagai sebuah sistem di mana rakyat berperan serta secara

substansial dalam menentukan proses produksi dan distribusi. Menurut Arief kalau sebuah masyarakat melaksanakan demokrasi ekonomi, maka diperkirakan masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat egalitarian, di mana semua warga berperan aktif dalam proses produksi (ikut menentukan apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak), dan memperoleh hasil-hasil produksi tersebut secara relatif merata.

Sebaliknya bila di dalam masyarakat tidak terdapat demokrasi ekonomi, maka proses produksi hanya ditentukan oleh sekelompok elit, dan hasil-hasil produksi tersebut tidak didistribusikan secara merata. Para elit yang menguasai proses produksi dan distribusi akan memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar ketimbang rakyat banyak yang tidak ikut campur (atau hanya terlibat pasif saja, misalnya menjadi bagian dari alat produksi) dalam kedua proses tersebut. Keadaan ekonomi yang dapat menjadi indikasi penerapan demokrasi ekonomi menurut Arief adalah tingkat pengangguran, proporsi pendapatan penduduk miskin, proporsi upah buruh di perusahaan,

Didik J. Rachbini dalam bukunya *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi (2001)* menyarikan empat substansi demokrasi ekonomi yang bertumpu pada semangat dan pemikiran para pendiri bangsa. *Pertama*, perlakuan yang adil dan dukungan pengembangan kepada pengusaha ekonomi lemah, terutama dalam hal akses ke sumber daya alam dan sumber dana. *Kedua*, keadilan dalam pengelolaan pertanahan dan sumber daya alam, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi. *Ketiga*, demokratisasi untuk kesejahteraan pekerja melalui dukungan untuk berserikat dan memperoleh hak kepemilikan saham di perusahaan. *Keempat*, akses seluasnya usaha kecil dan koperasi terhadap sumber daya keuangan dengan mereformasi perbankan agar tidak sekedar menjadi kasir konglomerat dan pengusaha besar.

Revrisond Baswir dalam artikelnya berjudul *Ekonomi Kerakyatan (2005)* berpandangan bahwa demokrasi ekonomi berdasarkan pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dalam garis besarnya mencakup tiga hal sebagai berikut. *Pertama*, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. *Kedua*, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia. *Ketiga*, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.

Sebagai konsekuensi logisnya, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.

Sehubungan dengan modal intelektual, negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya. Sementara itu, sehubungan

dengan modal institusional, negara wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Thoby Mutis dalam bukunya berjudul *Cakrawala Demokrasi Ekonomi* (2002) memaparkan beberapa parameter makro yang dapat digunakan untuk menilai perwujudan demokrasi ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Parameter tersebut adalah kontribusi koperasi terhadap PDRB, pangsa pasar produk koperasi, volume permodalan (omset) koperasi, kekuatan struktur jaringan koperasi, dan demokartisasi akses informasi. Secara umum Mutis berpandangan bahwa parameter demokrasi ekonomi hendaknya dijabarkan dari konsepsi yang ada di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai *normative economy* yang menjadi visi bagi pengelolaan ekonomi Indonesia.

Robert Dahl dalam bukunya berjudul *A Preface to Economic Democracy* yang sudah diterjemahkan Setiawan Abadi dengan judul *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar* (1992) menguraikan tiga substansi demokrasi ekonomi. *Pertama*, Dahl menekankan penyelenggaraan demokrasi ekonomi di perusahaan (tempat kerja) melalui pengelolaan perusahaan yang dimiliki secara kolektif secara demokratis oleh semua orang yang bekerja di dalamnya. Setiap orang yang dipekerjakan dalam perusahaan berhak atas satu dan hanya satu suara. Perusahaan seperti ini disebut Dahl sebagai Perusahaan Swapraja (*Self-Governing Enterprises*).

*Kedua*, penerapan kebijakan alokasi yang partisipatoris (*participatory allocation policy*). Dalam hal ini kompensasi yang diterima oleh seluruh anggota (pemilik) perusahaan ditentukan dengan cara melibatkan semua orang (pekerja) dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, menyangkut sistem kepemilikan dalam perusahaan swapraja, yang dapat merupakan variasi dari beberapa alternatif, yaitu kepemilikan individual, kepemilikan kooperatif, kepemilikan negara, dan kepemilikan sosial.

Martin Carnoy dalam bukunya berjudul *Economic Democracy: The Challenge of The 1980s* (1980) menganalisis lima aspek dalam penyelenggaraan demokrasi ekonomi. *Pertama*, perlunya kepemilikan bersama (*public ownership*) atas cabang-cabang produksi dan sumber daya yang dikategorikan sebagai kepemilikan umum, yang dalam hal ini pengelolaannya dikuasakan kepada negara (melalui Badan Usaha Milik Negara). *Kedua*, perlunya kontrol demokratis terhadap investasi, sehingga tidak terjadi spekulasi dan konsentrasi modal yang dapat mendistorsi perekonomian nasional secara keseluruhan.

*Ketiga*, demokratisasi di tempat kerja, yaitu dengan melibatkan pekerja dalam pemilihan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan, yang umumnya diterapkan melalui pola kepemilikan saham oleh pekerja (*employee share ownership plan=ESOP*) dan pembentukan koperasi produsen. *Keempat*, pengembangan teknologi yang demokratis, yaitu dengan melibatkan peranserta masyarakat luas dan teknologi yang dikembangkan adalah teknologi yang dibutuhkan juga oleh masyarakat luas (teknologi tepat guna). *Kelima*, kontrol terhadap perusahaan agar tidak menjadi monopolis dan memunculkan konsentrasi kekayaan (aset) yang dapat memperlebar ketimpangan ekonomi dan sosial.

Carnoy memandang bahwa dalam demokrasi ekonomi peraturan-peraturan permainan pasar akan berubah; di mana akan lebih banyak pemain (koperasi, perusahaan-perusahaan milik karyawan, perusahaan-perusahaan milik masyarakat, dan perusahaan-perusahaan negara). Hubungan antarpemain tersebut akan lebih seimbang di mana tangan tersembunyi hanya bekerja apabila produsen dan konsumen relatif setara dalam pengetahuan dan kekuasaan.

Michael Poole dalam bukunya berjudul *The Origin of Economic Democracy* (1986: 1) mengartikan demokrasi ekonomi sebagai partisipasi pekerja dalam kepemilikan sebuah perusahaan dan pembagian dari penghargaan (*reward*). Sedangkan demokrasi industrial

merupakan bentuk partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan pekerja dalam proses pengawasan jalannya perusahaan.

David Schweickart dalam artikelnya yang berjudul *Economic Democracy: Worthy Socialism That Would Really Work (1992)* mengidentikkan demokrasi ekonomi sebagai bentuk sosialisme pasar dengan tiga pilar institusinya, yaitu :

- a. Manajemen perusahaan oleh pekerja (*worker self-management*)
- b. Pembagian barang dan jasa melalui sistem pasar
- c. Kontrol sosial terhadap investasi modal

Tujuan mendasar dari ketiga core institusi ini adalah untuk melakukan demokratisasi di tempat kerja melalui pembagian modal (*capital*) dan bagi hasil (*profit*) kepada pekerja.

### **Hasil Studi Aplikasi Metode Delphi**

Sesuai rencana aplikasi Metode Delphi dalam penelitian ini maka distribusi instrumen penelitian kepada para-ahli dilakukan sebanyak dua kali (dua putaran). 10 ahli yang menjadi responden Delphi dalam penelitian ini selengkapnya adalah:

1. Prof. Dr. San Afri Awang, MSc (Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM)
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc (ekonom, Rektor UII, dan Staf Ahli PUSTEK UGM)
3. Drs. Revrison Baswir, MBA (ekonom dan mantan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM)
4. Dr. Noer Sutrisno, MEc (ekonom IPB, dan Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia)
5. Dr. Fahmi Radhi, MBA (ekonom, Direktur Program Diploma Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan Staf Ahli PUSTEK UGM).
6. Ichsanudin Noorsy, SH, MSc (ekonom, Tim Indonesia Bangkit (TIB), dan Staf Ahli PUSTEK UGM)
7. Dr. Muhammad Fadhil Hasan, MEc (ekonom, dosen IPB, dan Staf Ahli INDEF)
8. Henry Saragih (Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Sekjen La Via Campesina)
9. Dr. Ahmad Erani Yustika, MEc (ekonom, dosen Universitas Brawijaya, dan Peneliti INDEF)
10. Drs. Hudiyanto (ekonom, dosen UMY, dan Peneliti PUSTEK UGM)

Selengkapnya hasil penilaian ahli terhadap instrumen penelitian yang berupa rancangan (hipotetik) Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia diuraikan di bawah ini:

#### **a. Temuan Aplikasi Metode Delphi Putaran I**

Pada distribusi instrumen penelitian putaran I dapat diketahui penilaian para-ahli terhadap 22 variabel penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan para-ahli menerima susunan umum Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia yang terdiri dari Dimensi Demokrasi Produksi, Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi, dan Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi beserta kriteria pada setiap dimensi tersebut. Selengkapnya penilaian para-ahli terhadap masing-masing variabel dalam dimensi dan kriteria tersebut dapat dilihat di bawah ini:

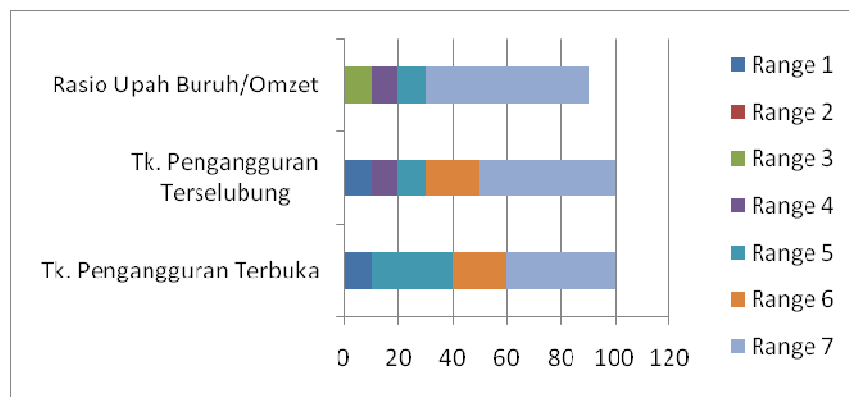
### 1). Variabel Dimensi Demokrasi Produksi (DP) = X

Pada dimensi demokrasi produksi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) terdapat 4 (40%) ahli (Delphi) yang menilai pada *range* 7 (maksimum), 2 Delphi (20%) menilai pada *range* 6, 3 Delphi (30%) menilai pada *range* 5, dan 1 Delphi (10%) yang menilai pada *range* 1 (minimum). Nilai Skor Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka Rata-Rata adalah sebesar 0,812, di atas Batas Minimum Persetujuan sebesar 0,712.

Pada variabel Tingkat Pengangguran Terselubung (X2) terdapat 5 Delphi (50%) yang menilai dalam *range* 7, 2 Delphi (20%) menilai pada *range* 6, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 5, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 1. Nilai Skor Variabel Tingkat Pengangguran Terselubung Rata-Rata adalah sebesar 0,771, masih sedikit di atas batas minimum persetujuan.

Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan (X3) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada *range* 7, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 5, 1 Delphi (10%) pada *range* 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 3. Nilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan adalah sebesar 0,800, di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 1. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Produksi (DP)**

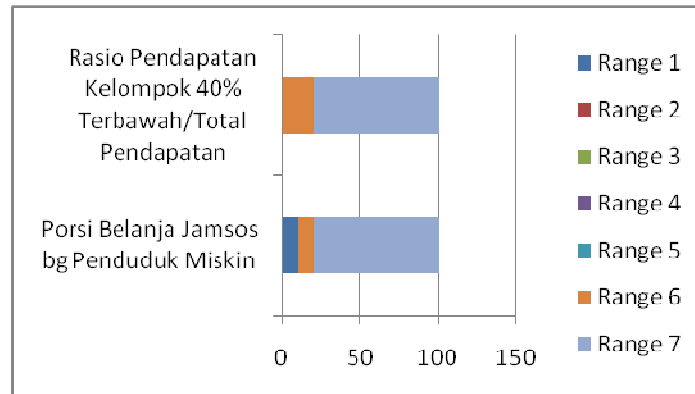


### 2). Variabel Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) = Y

Pada dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi Variabel Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap Total Belanja (Y1) terdapat 8 Delphi (80%) yang menilai pada *range* 7, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 6, dan 1 Delphi (10%) pada *range* 1. Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap Total Belanja Daerah Rata-Rata adalah sebesar 0,900, di atas batas minimum persetujuan.

Pada dimensi Variabel Proporsi Pendapatan 40% Kelompok Terbawah Terhadap Total Pendapatan (Y2) terdapat 8 Delphi (80%) yang menilai pada *range* 7 dan 2 Delphi (2%) menilai pada *range* 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Pendapatan 40% Kelompok Terbawah Terhadap Total Pendapatan adalah sebesar 0,971, jauh di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 2. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK)**



### 3). Variabel Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)= Z

Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk faktor produksi, yaitu faktor produksi material, intelektual, dan institusional. Selengkapnya pembahasan terhadap masing-masing bentuk faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Material

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Material Variabel Proporsi APBD terhadap PDRB (Z1) terdapat 3 Delphi (30%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%) menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi APBD terhadap PDRB Rata-Rata adalah sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi PAD terhadap APBD (Z2) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi PAD terhadap APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,785, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Pembiayaan Domestik terhadap APBD (Z3) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%). Nilai Skor Variabel Proporsi Proporsi Pembiayaan Domestik terhadap APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi APBD terhadap Total Omzet Hasil Eksploitasi SDA di Daerah (Z4) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 3 Delphi (30%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi APBD terhadap Total Omzet Hasil Eksploitasi SDA di Daerah Rata-Rata adalah sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Konsumsi Perkapita terhadap Kredit Konsumsi Perkapita (Z5) terdapat 2 Delphi (20%) yang menilai pada range 7, 3 Delphi (30%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5, dan 2 Delphi (20%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi Proporsi Konsumsi Perkapita terhadap Kredit Konsumsi Perkapita Rata-Rata adalah sebesar **0,700**, atau **di bawah batas minimum persetujuan**.

Pada Variabel Proporsi Investasi Domestik Terhadap Total Investasi (Z6) di Daerah terdapat 5 Delphi (50%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 3 Delphi (30%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel

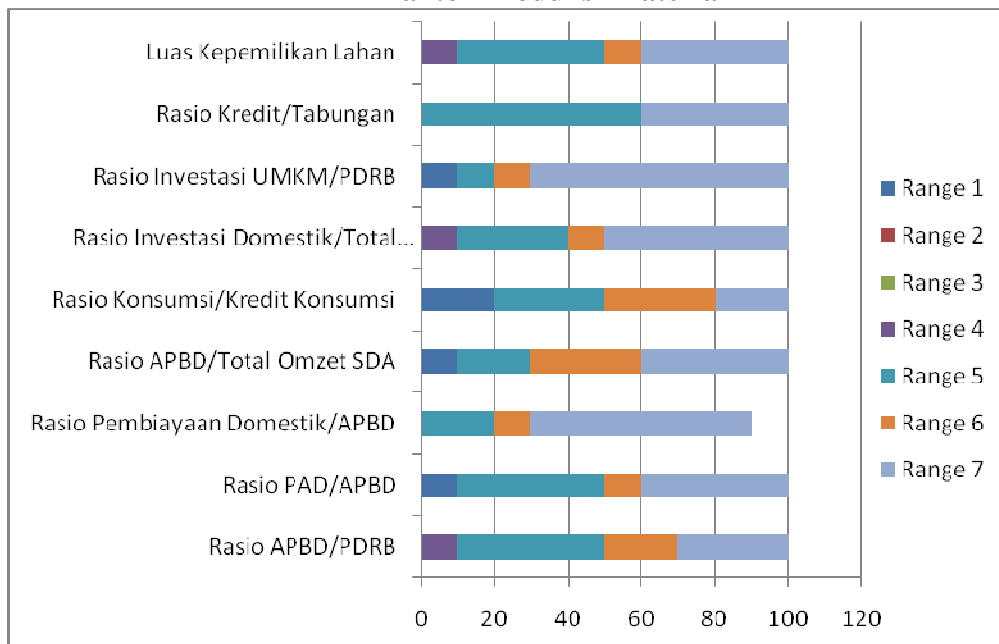
Proporsi Investasi Domestik Terhadap Total Investasi di Daerah Rata-Rata adalah sebesar 0,857, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PDRB (Z7) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi Investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PDRB Rata-Rata adalah sebesar 0,871, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Kredit terhadap Tabungan (Z8) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7 dan 6 Delphi (30%) menilai pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi Kredit terhadap Tabungan Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Tanah) (Z9) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Tanah) Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 3. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Material**



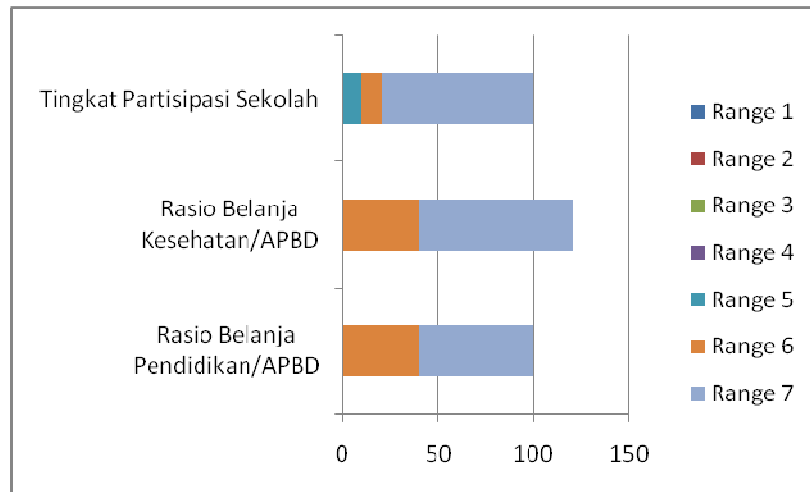
**a. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Intelektual**

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Intelektual Variabel Proporsi Belanja Pendidikan dalam APBD (Z10) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7 dan 4 Delphi (40%) menilai pada range 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Pendidikan dalam APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,967, jauh di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Belanja Kesehatan dalam APBD (Z11) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7 dan 4 Delphi (40%) menilai pada range 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Kesehatan dalam APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,943, jauh di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi (Tingkat) Partisipasi Sekolah (Z12) terdapat 8 Delphi (80%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi (Tingkat) Partisipasi Sekolah Rata-Rata adalah sebesar 0,943, jauh di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 4 Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Intelektual**



**b. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Instiusional**

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Instiusional Variabel Proporsi Anggota Koperasi dari Total Jumlah Penduduk (Z13) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi Anggota Koperasi dari Total Jumlah Penduduk Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (Z14) terdapat 3 Delphi (30%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%) menilai pada range 6, dan 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Rata-Rata adalah sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan.

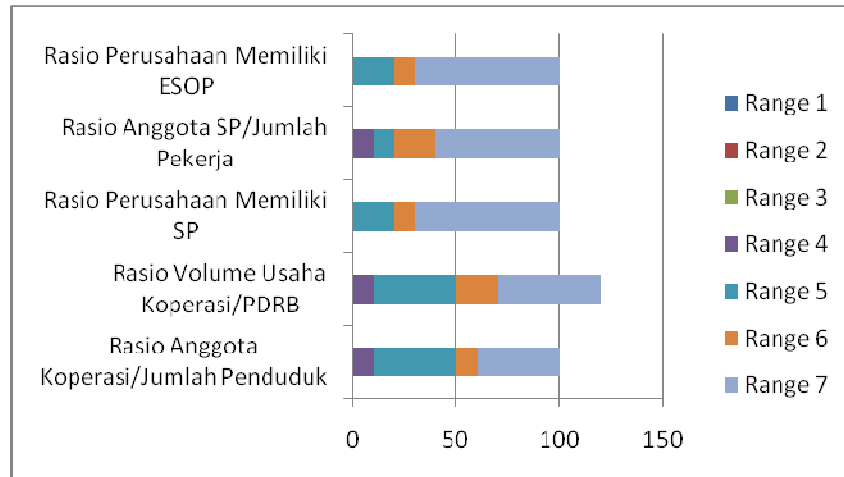
Pada Variabel Proporsi Perusahaan Yang Memiliki Serikat Pekerja (Z15) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi Perusahaan Yang Memiliki Serikat Pekerja Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Anggota Serikat Pekerja terhadap Jumlah Pekerja Total (Z16) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%) menilai pada range 6, 1 Delphi (10%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi Anggota Serikat Pekerja terhadap Jumlah Pekerja Total Rata-Rata adalah sebesar 0,900, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Perusahaan Yang Menerapkan Pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja (Z17) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi Perusahaan Yang

Menerapkan Pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja Rata-Rata adalah sebesar 0,928, jauh di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 5. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Institusional**



Secara keseluruhan aplikasi Metode Delphi Putaran I menghasilkan 21 variabel yang nilai skor rata-ratanya di atas batas minimum persetujuan. Hanya terdapat 1 variabel dalam Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Material, yaitu Variabel Proporsi Konsumsi Perkapita terhadap Konsumsi Perkapita yang dinilai para-ahli (Nilai Skor Variabel Rata-Rata) di bawah batas minimum persetujuan. Nilai Skor Dimensi Rata-Rata untuk Dimensi Demokrasi Produksi adalah sebesar 0,794, Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsums sebesar 0,953, dan Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi sebesar 0,861.

**Tabel 6. Nilai Skor Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia**

No	Dimensi/Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia  (IDEI)	Batas Minimum	Nilai Skor
		Persetujuan*	Variabel Rata- Rata**
<b>X</b>	<b>Demokrasi Produksi (DP)</b>	0,714	<b>0,794</b>
1	Tk. Pengangguran Terbuka	0,714	0,812
2	Tk. Pengangguran Terselubung	0,714	0,771
3	Rasio Upah Buruh/Omzet Perusahaan	0,714	0,800
<b>Y</b>	<b>Demokrasi Alokasi (DA)</b>	0,714	<b>0,935</b>
1	Porsi Belanja bg Penduduk Miskin	0,714	0,900
2	Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah/Total Pendapatan	0,714	0,971
<b>Z</b>	<b>Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)</b>	0,714	<b>0,861</b>
Z-a	<i>Faktor Produksi Material</i>		
1	Rasio APBD/PDRB	0,714	0,814
2	Rasio PAD/APBD	0,714	0,785
3	Rasio Pembiayaan Domestik/APBD	0,714	0,828
4	Rasio APBD/Total Omzet SDA	0,714	0,814
5	Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi	<b>0,714</b>	<b>0,700</b>
6	Rasio Investasi Domestik/Total Investasi	0,714	0,857
7	Rasio Investasi UMKM/PDRB	0,714	0,871
8	Rasio Kredit/Tabungan	0,714	0,828
9	Rata2 Luas Kepemilikan Lahan	0,714	0,828
Z-b	<i>Faktor Produksi Intelektual</i>		
10	Rasio Belanja Pendidikan/APBD	0,714	0,967
11	Rasio Belanja Kesehatan/APBD	0,714	0,943
12	Rasio Partisipasi Sekolah	0,714	0,943
Z-c	<i>Faktor Produksi Institusional</i>		
13	Rasio Anggota Koperasi/Jumlah Penduduk	0,714	0,828
14	Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB	0,714	0,814
15	Rasio Perusahaan Memiliki SP	0,714	0,828
16	Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja	0,714	0,900
17	Rasio Perusahaan Memiliki ESOP	0,714	0,928

\* : Batas Minimum Persetujuan = Range Persetujuan Minimum (50) / Range Persetujuan Maksimum (70)

\*\* : Nilai Skor Variabel / Nilai Skor Maksimum (70)

Secara keseluruhan aplikasi Metode Delphi pada putaran I telah menghasilkan hipotetik susunan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia sesuai dengan hipotetik susunannya dalam instrumen penelitian. Susunan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

**Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) = Demokrasi Produksi (DP) + Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) + Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)**

atau,  
**IDEI = DP + DAK + DPFP**

di mana,

**DP = X1 + X2 + X3**  
**DAP = Y1 + Y2**  
**DPFP = Z1 + ,...Z17**

Hipotetik bobot masing-masing dimensi dapat didasarkan pada penilaian para-ahli yang menghasilkan Nilai Skor Dimensi Rata-Rata, yaitu Dimensi Demokrasi Produksi sebesar 0,794, Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi sebesar 0,935, dan Dimensi Penguasaan Faktor Produksi sebesar 0,861. Formula hipotetik putaran I Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia dengan adalah sebagai berikut:

$$\text{IDEI} = (0,79)\text{DP} + (0,93)\text{DAK} + (0,86)\text{DPFP}$$

## 2). Temuan Aplikasi Delphi Putaran 2

Sesuai dengan karakteristik Metode Delphi, yaitu iterasi dan umpan balik yang terkelola, maka responden Delphi diberi kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki jawabannya. Hal ini dilakukan setelah responden Delphi memperoleh informasi perihal hasil analisis data sementara yang menunjukkan penilaian umum para-ahli responden Delphi. Hasil analisis data putaran I tersebut selanjutnya digunakan sebagai instrumen penelitian pada aplikasi Metode Delphi putaran II.

Distribusi instrumen putaran II menghasilkan temuan yang secara umum memperkuat temuan putaran sebelumnya, di mana hanya 1 responden Delphi yang mengubah jawabannya secara positif pada 1 buah variabel. Perubahan ini dilakukan pada variabel Proporsi Upah Buruh terhadap Total Omzet Perusahaan, dari yang semula dinilai pada range 4 kemudian diubah menjadi dinilai pada range 7 (maksimum). Sementara itu jawaban semua responden Delphi pada seluruh variabel yang lain pada putaran I tidak mengalami perubahan.

Sementara itu penilaian para-ahli terhadap Bobot Dimensi yang dihasilkan dari Nilai Skor Dimensi Rata-Rata menunjukkan kecenderungan penerimaan para-ahli responden Delphi terhadap nilai bobot yang diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai (tingkat) persetujuan

terhadap semua Bobot Dimensi yang sebesar 80%, sedangkan nilai (tingkat) ketidaksetujuan hanya sebesar 6,66%. Tingkat ketidaksetujuan pada Dimensi Demokrasi Produksi dan Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi adalah sama-sama sebesar 3,33%. Tidak terdapat ketidaksetujuan dari para-ahli responden Delphi pada Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi. Dalam pada itu nilai (tingkat) abstain (keraguan) adalah sebesar 13,34%.

**Tabel 7. Nilai Skor Aplikasi Metode Delphi Putaran II**

No	Dimensi/Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia  (IDEI)	Perubahan Jawaban* (%)		Penilaian Tentang Bobot Dimensi** (%)	
		YA	TIDAK	SETUJU	TIDAK SETUJU
		<b>X</b>	<b>Demokrasi Produksi (DP)</b>		
1	Tk. Pengangguran Terbuka	0	100		
2	Tk. Pengangguran Terselubung	0	100		
3	Rasio Upah Buruh/Omzet Perusahaan	10	90		
<b>Y</b>	<b>Demokrasi Alokasi (DA)</b>			80	10
1	Porsi Belanja bg Penduduk Miskin	0	100		
2	Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah/Total Pendapatan	0	100		
<b>Z</b>	<b>Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)</b>			80	0
Z- a	<i>Faktor Produksi Material</i>				
1	Rasio APBD/PDRB	0	100		
2	Rasio PAD/APBD	0	100		
3	Rasio Pembiayaan Domestik/APBD	0	100		
4	Rasio APBD/Total Omzet SDA	0	100		
5	Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi	0	100		
6	Rasio Investasi Domestik/Total Investasi	0	100		
7	Rasio Investasi UMKM/PDRB	0	100		
8	Rasio Kredit/Tabungan	0	100		
9	Rata2 Luas Kepemilikan Lahan	0	100		
Z- b	<i>Faktor Produksi Intelektual</i>				
10	Rasio Belanja Pendidikan/APBD	0	100		
11	Rasio Belanja Kesehatan/APBD	0	100		
12	Rasio Partisipasi Sekolah	0	100		
Z- c	<i>Faktor Produksi Institusional</i>				
13	Rasio Anggota Koperasi/Jumlah Penduduk	0	100		
14	Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB	0	100		
15	Rasio Perusahaan Memiliki SP	0	100		

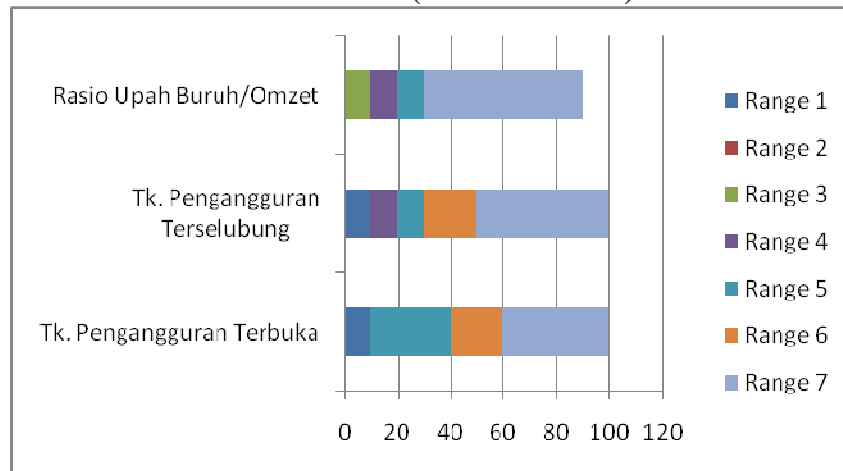
16	Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja	0	100		
17	Rasio Perusahaan Memiliki ESOP	0	100		
	Nilai Rata-Rata	5,88	94,12	80,00	6,66

\* : Jawaban TIDAK merupakan persetujuan final terhadap kesesuaian variabel sebagai elemen Indeks

\*\* : Bobot dimensi sesuai rerata nilai elemen variabel penyusun dimensi, yaitu Demokrasi Produksi = 0,79, Demokrasi Alokasi = 0,93 dan Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi = 0,86

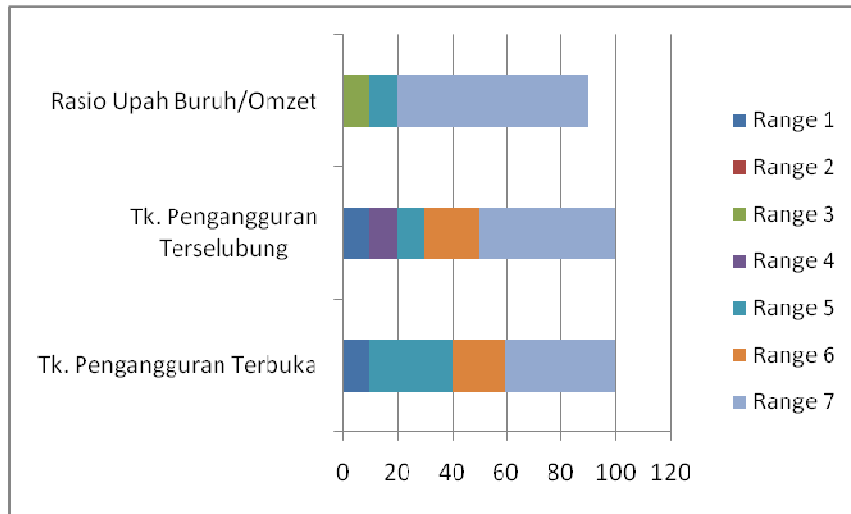
Satu-satunya perubahan jawaban yang dilakukan oleh responden Delphi selanjutnya mengubah Nilai Skor Variabel Proporsi Upah Buruh terhadap Total Omzet Perusahaan. Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan (X3) aplikasi Metode Delphi Putaran I terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 5, 1 Delphi (10%) pada range 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 3. Nilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan pada Putaran I adalah sebesar 0,800, di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 8. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Produksi Pada Putaran I (Sebelum Revisi)**



Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan (X3) aplikasi Metode Delphi Putaran II terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 3. Nilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan pada aplikasi Metode Delphi Putaran II (revisi jawaban) naik menjadi sebesar 0,814 dan tetap di atas batas minimum persetujuan.

**Tabel 9. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Produksi Pada Putaran 2 (Sesudah Revisi)**



Perubahan jawaban 1 Delphi terhadap 1 variabel (Proporsi Upah Buruh terhadap Total Omzet Perusahaan) pada putaran II juga mengubah Nilai Skor Dimensi Demokrasi Produksi dari sebelumnya sebesar 0,794 menjadi sebesar 0,799. Sementara itu, Nilai Skor Dimensi Rata-Rata dan Nilai Skor Variabel Rata-Rata lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai perubahan yang tidak mengubah nilai desimal pertama ini kurang signifikan, sehingga penentuan Bobot Dimensi Demokrasi Produksi tetap signifikan untuk menggunakan penilaian para-ahli pada putaran II yang untuk dimensi tersebut tingkat persetujuannya sudah mencapai 80% dan tingkat ketidaksetujuannya hanya 3,3%.

**Tabel 10. Nilai Skor Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia  
-Putaran II (Revisi)**

No	Dimensi/Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI)	Batas Minimum Persetujuan	Nilai Skor Variabel Rata-Rata
<b>X</b>	<b>Demokrasi Produksi (DP)</b>	0,714	<b>0,799*</b>
1	Tk. Pengangguran Terbuka	0,714	0,812
2	Tk. Pengangguran Terselubung	0,714	0,771
3	Rasio Upah Buruh/Omzet Perusahaan	0,714	<b>0,814**</b>
<b>Y</b>	<b>Demokrasi Alokasi (DA)</b>	0,714	<b>0,935</b>
1	Porsi Belanja bg Penduduk Miskin	0,714	0,900
2	Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah/Total Pendapatan	0,714	0,971
<b>Z</b>	<b>Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)</b>	0,714	<b>0,861</b>
Z-a	<i>Faktor Produksi Material</i>		
1	Rasio APBD/PDRB	0,714	0,814
2	Rasio PAD/APBD	0,714	0,785
3	Rasio Pembiayaan Domestik/APBD	0,714	0,828
4	Rasio APBD/Total Omzet SDA	0,714	0,814
5	Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi	<b>0,714</b>	<b>0,700</b>
6	Rasio Investasi Domestik/Total Investasi	0,714	0,857
7	Rasio Investasi UMKM/PDRB	0,714	0,871
8	Rasio Kredit/Tabungan	0,714	0,828
9	Rata2 Luas Kepemilikan Lahan	0,714	0,828
Z-b	<i>Faktor Produksi Intelektual</i>		
10	Rasio Belanja Pendidikan/APBD	0,714	0,967
11	Rasio Belanja Kesehatan/APBD	0,714	0,943
12	Rasio Partisipasi Sekolah	0,714	0,943
Z-c	<i>Faktor Produksi Institusional</i>		
13	Rasio Anggota Koperasi/Jumlah Penduduk	0,714	0,828
14	Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB	0,714	0,814
15	Rasio Perusahaan Memiliki SP	0,714	0,828
16	Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja	0,714	0,900
17	Rasio Perusahaan Memiliki ESOP	0,714	0,928

\* : Nilai Skor Revisi dari sebelumnya sebesar 0,794

\*\* : Nilai Skor Revisi dari sebelumnya sebesar 0,800

Secara keseluruhan hasil distribusi instrumen penelitian aplikasi Metode Delphi Putaran II memperkuat temuan Dimensi, Kriteria, dan Indikator (Variabel) Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia pada aplikasi Metode Delphi Putaran I. Perubahan jawaban pada 1 Variabel oleh 1 Delphi tidak signifikan dan juga meningkatkan nilai skor variabel diubah yang memperkuat temuan sebelumnya. Oleh karena itu hasil temuan aplikasi Metode Delphi pada Putaran I dapat digunakan sebagai dasar penetapan Variabel dan Susunan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia yang sudah diformulasikan secara hipotetik pada analisis hasil temuan aplikasi Metode Delphi pada putaran I.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis penilaian ahli dalam aplikasi Metode Delphi Putaran I dan II maka dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

#### **Simpulan**

1). Variabel yang dinilai sesuai oleh para-ahli dan mencapai nilai skor di atas batas minimum persetujuan, sehingga dapat dijadikan sebagai unsur penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) adalah sebanyak 21 variabel yang terbagi dalam 3 Dimensi, yaitu:

A. Dimensi Demokrasi Produksi (DP) = X

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)
2. Tingkat Pengangguran Terselubung (X2)
3. Rasio Upah Buruh Terhadap Total Omzet Perusahaan (X3)

B. Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) = Y

1. Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap APBD (Y1)
2. Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terendah Terhadap Total Pendapatan (Y2)

C. Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP) = Z

1. Rasio APBD Terhadap PDRB (Z1)
2. Rasio PAD Terhadap APBD (Z2)
3. Rasio Pembiayaan Domestik Terhadap APBD (Z3)
4. Rasio APBD Terhadap Total Omzet Hasil Eksploitasi SDA (Z4)
5. Rasio Investasi Domestik Terhadap Total Investasi (Z5)
6. Rasio Investasi UMKM Terhadap PDRB (Z6)
7. Rasio Kredit Terhadap Tabungan (Z7)
8. Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Z8)
9. Rasio Belanja Pendidikan Terhadap APBD (Z9)
10. Rasio Belanja Kesehatan Terhadap APBD (Z10)
11. Tingkat Partisipasi Sekolah (Z11)
12. Rasio Anggota Koperasi Terhadap Total Jumlah Penduduk (Z12)
13. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (Z13)
14. Rasio Perusahaan Memiliki Serikat Pekerja (Z14)
15. Rasio Anggota Serikat Pekerja Terhadap Total Jumlah Pekerja (Z15)
16. Rasio Perusahaan Yang Memiliki Pola Kepemilikan Saham Oleh Pekerja (Z16)

2). Susunan (formula) umum Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) yang disetujui oleh para-ahli adalah:

$$\begin{aligned} DP &= X1 + X2 + X3 \dots\dots\dots(i) \\ DAP &= Y1 + Y2 \dots\dots\dots(ii) \\ DPFP &= Z1 + ,...Z16 \dots\dots\dots(iii) \\ IDEI &= DP + DAK + DPFP \dots\dots\dots(iv) \end{aligned}$$

3). Susunan (formula) Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia yang mempertimbangkan pembobotan nilai skor yang disetujui oleh para-ahli adalah:

$$IDEI = (0,79)DP + (0,93)DAK + (0,86)DPFP \dots\dots\dots(v)$$

**Rekomendasi**

- 1) Pemerintah dalam hal ini BPS, Bappenas, Bank Indonesia, atau Universitas Gadjah Mada (Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan) perlu menjadikan IDEI sebagai alternatif alat ukur tingkat penerapan demokrasi ekonomi di Indonesia, yang kemudian dapat memperbandingkan penerapannya antardaerah di seluruh Indonesia dan dievaluasi perkembangannya dari tahun ke tahun atau minimal 3 tahun sekali.
- 2) Pemerintah dan DPR RI hasil Pemilihan Umum 2009 perlu menjadikan hasil pengukuran IDEI sebagai sarana untuk mendorong pengarusutamaan aspek pemerataan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi Indonesia selain aspek pertumbuhan dan efisiensi.
- 3) Ekonom yang berkomitmen terhadap ide demokrasi ekonomi perlu menjadikan IDEI sebagai variabel baru yang setelah diukur dalam konteks perekonomian daerah dapat dikorelasikan dengan berbagai fenomena ekonomi daerah (nasional) seperti halnya kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, pendapatan riil (perkapita), pertumbuhan, dan variabel makro-ekonomi lain di Indonesia dengan memanfaatkan alat-alat analisis ekonometrik yang sudah tersedia.
- 4) Peneliti ekonomi perlu menjadikan IDEI sebagai rintisan awal (*starting-point*) bagi berkembangnya inovasi (penemuan) baru terhadap alat ukur, model, dan teori demokrasi ekonomi Indonesia yang lebih baik (canggih) di masa-masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Archer, Robin, *Economic Democracy: The Politics of Feasible Socialism*, Clarendon Press
- Arief, Sritua, 2006, *Negeri Terjajah*, Yogyakarta, Resist Book
- Aly, Bachtiar, Indradi Kusuma, Prasetyadji, 2002, *Menuju Indonesia yang Demokratis, Adil & Pluralis*, Forum Kesatuan Komunikasi Bangsa, Jakarta
- Booth, Anne, 1998, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*, London, Macmillan.
- Bruyn, Severyn T., 2000, *A Civil Economy: Transforming the Market in the 21<sup>st</sup> Century*, Michigan, University of Michigan Press.
- Brookings, Robert S, 1929, *Economic Democracy: America's Answer to Socialism and Communism; a Collection of Articles, Addresses and Papers*, The Macmillan company
- Carnoy, Martin and Derek S., 1980, *Economic Democracy: The Challenge of 1980s*, New York, M.E. Sharpe.
- Chartier, Cary, 2001, *Civil Right and Economic Democracy*
- Cumbers, Andre, 2007, *Economic Democracy and Public Ownership*, Glasgow, University of Glasgow
- Dahl, Robert A, 1985, *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Akhmad Setiawan, Jakarta, Yayasan Obor.
- Devune, Pat, 1995, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Dick, Howard, et, al, 2002, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*, Honolulu, Allen & Unwin Hawaii Press.
- Eisy, M. Ridlo, 1990, "Perjuangan Nasional Perbaikan Nasib Rakyat", *Kebangkitan Nasional*, PB PWI.
- Fukuyama, Francis, 1995, *Trust*, New York, Simon & Schuster Inc., Free Press Paperbacks.
- Forum Rektor Indonesia, 2007, *Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial*, (naskah akademik), Makassar, FRI.
- Fotopoulos, Takis, Ch. 14: Economic Democracy, dalam *The Multidimensional Crisis and Inclusive Democracy*, di akses di internet pada tanggal 12/9/2007 jam 07.46 WIB.
- Fowler Jr., F. (1993). *Survey research methods*. Thousand Oaks, USA: Sage Publications.
- Grossman, Gregory, 2004, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Heilborner, & Milberg, 1998, *The Making of Economic Society*, London, Prentice Hall
- Hines, Collins, 2005, *Mengganti Globalisasi Ekonomi Menjadi Lokalisasi Demokrasi*, Insist Press, Yogyakarta
- Huntington, Samuel P., 1997, *The Clash of civilization and The Remaking of World Order*, India, Penguin Books.
- Koesnadi Hardjosoemantri dkk, 2004, *Program Aksi Meluruskan Reformasi*, UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Kekic, Laza, 2007, *The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy*, EIU Report 2007
- Kriegman, Orion, 1998, *The Potential for Economic Democracy n America*
- Mubyarto and Daniel W. Bromley, 2002, *A Development Alternative for Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Mubyarto, 2004, *Tekokrat dan Ekonomi Pancasila*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta

- \_\_\_\_\_ (ed), 2004, *Pancasila, UGM, dan Jati Diri Bangsa*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta (akan terbit)
- \_\_\_\_\_, 2004, *Neoliberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, PUSTEP & Aditya Media.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP-UGM*, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Ekonomi Pasar Populis*, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Menggugat Sistem Pendidikan Nasional: Refleksi Pendidikan Akhir Tahun 2004*, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Satu Abad Sumpah Pemuda: Visi Indonesia 2028*, Aditya Media, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pusat Studi Non-Disipliner: Reformasi Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial-Humaniora di Universitas Gadjah Mada*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto, Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Bogor, Yayasan Agro Ekonomika (YAE).
- Mutis, Thoby, 2002, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Nyerere, Julius K., 1990, *The Challenge to The South: The Report of The South Commission*, Oxford, Oxford University Press.
- Perkins, John, 2004, *Confessions of an Economic Hit Man*, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers Inc.
- Retnonowati Abdulgani-Knapp, 2003, *A Fading Dream: The Story of Roeslan Abdulgani and Indonesia*, Utopia Press Pte Ltd, Singapura
- Poole, Michael, 1987, *The Origin of Economic Democracy*, Routledge, London
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, 2002, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BI, Jakarta
- Rachbini, Didik J, 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta
- Smith, J.W., 2000, *Economic Democracy: Political Struggle in Twenty-first Centuries*, New York, M.E. Sharpe.
- Sarbini Sumawinata, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia, Jakarta
- Selo Soemardjan, 1962, *Social Changes in Yogyakarta*, Ithaca, Cornell University Press.
- Sofian Effendi, 2004, *Revitalisasi Jati Diri UGM menghadapi Perubahan Global*, Pidato Dies Natalis ke-55, 20 Desember 2004, UGM, Yogyakarta
- Svante, Ericson & Jan-Eric Lane, 2002, *Demokratisasi Pertumbuhan*, RajaGarfindo, Jakarta
- Swasono, Sri Edi, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta
- Situmorang, Johny W dkk, *Prototipe Model Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan MDP*, dalam Infokop No 28 Tahun XXII, 2006
- The Heritage Foundation, *Index of Economic Freedom 2007*
- Wikipedia, 2007, *Economic Democracy*, diakses di internet tanggal 12/8/2007
- Williams, 2002, *Bologna and Emilia Romagna: A Model of Economic Democracy*, diakses di internet tanggal 12/8/07 jam 09.49 WIB.
- Wertheim, W.F., 1961, *Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy*, The Hague, W. Van Hoeve Publishers.
- Wibowo, I., Francis Wahono, 2003, *Neoliberalisme*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.

